

**DARI  
INDUSTRI GULA  
HINGGA  
BATIK PEKALONGAN**

Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa  
pada Masa Kolonial Belanda



DARI  
INDUSTRI GULA  
HINGGA  
BATIK PEKALONGAN

Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa  
pada Masa Kolonial Belanda

Prof. Dr. Wasino, M.Hum.  
Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.



# DARI INDUSTRI GULA HINGGA BATIK PEKALONGAN

Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda

Penyusun: **Wasino** dan **Endah Sri Hartatik**

Tata Letak: **Ahmady Averoez DK56**

Desain Sampul: **Dany RGB**

Cetakan Pertama 2017

xviii + 220 hlm; 16 cm x 24 cm

ISBN: 978-602-XXXX-XX-X

Hak Cipta © pada penulis dan dilindungi undang-undang Penerbitan.

Hak penerbitan pada Penerbit Magnum Pustaka Utama

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan cara apapun termasuk mengcopy tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh:

**MAGNUM PUSTAKA UTAMA**

Beran RT. 07 No. 56 Ds IX Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp: (0274) 8276966

Email: penerbit.magnum@gmail.com

# PRAKATA

Pantai Utara Jawa merupakan kawasan yang dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam bahasa sehari-hari pantai utara Jawa disingkat menjadi “Pantura”. Bayangan orang tentang Pantura ini umumnya mengacu pada dua hal, yakni jalan raya dan wilayah pantai yang membentang dari Banten hingga Surabaya. Dalam konteks Jawa bagian Tengah (dari Brebes hingga Rembang), Pantura merupakan kawasan ekonomi dan jalur transportasi yang sudah tua usianya. Zaman Mataram, wilayah ini dinamakan pesisir, kemudian pada masa VOC daerah ini dinamakan North East (Pantai Timur), dan pada awal abad XX muncul sebutan *North Coast* atau Pantai Utara.

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan tentang salah satu sejarah ekonomi wilayah pantai utara Jawa Tengah yang cukup penting, yaitu Pekalongan. Wilayah ini telah ada sejak zaman Mataram dan berkembang pesat hingga saat ini. Wilayah ini berkembang dari sebuah desa kemudian meningkat menjadi Kabupaten, Kota, dan Karesidenan. Fokus temporal kajian adalah masa penjajahan Belanda. Aspek yang dikaji meliputi ekonomi yang muncul, baik akibat pengaruh kebijakan Kolonial Belanda maupun ekonomi yang tumbuh akibat kreativitas masyarakat, baik yang telah dikembangkan sebelum penjajahan maupun masa penjajahan Belanda.

Buku ini merupakan kompilasi sejumlah hasil penelitian. Penelitian *pertama* berkaitan dengan sejarah kebijakan ekonomi dan pertumbuhan tanaman pangan tahun 1990 yang didanai oleh UGM dan Universitas Leiden. Penelitian *kedua*, penelitian kebijakan pangan yang dilakukan atas dana dari Direktorat Kebudayaan, Kementerian

Pariwisata tahun 2010. *Ketiga*, penelitian hibah bersaing bertema Pembelajaran Sejarah Berbasis Museum dengan dana penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Keempat*, Penelitian Sejarah Ekonomi Desa Pekalongan dengan dana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2010. *Kelima*, penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional yang didanai oleh Dirjen Diktitahun 2015 dan 2016. *Keenam*, Sebagian data juga berasal bahan-bahan riset Endah Sri Hartatik, terutama dari riset Tesis dan Disertasi di UGM.

Buku ini hanya dapat diselesaikan atas bantuan beberapa pihak, sehubungan dengan hal itu perlu disampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya. *Pertama-tama* saya sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah yang bersedia mendanai draft awal dalam bentuk laporan dokumentasi “Kajian Sejarah Ekonomi Desa Pekalongan”. Terkait dengan hal itu pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terimakasih kepada para asisten yang telah membantu kegiatan penelitian, yaitu: Endah Sri Hartatik, Moh. Saiful, Nina Witasari, dan M. Sokheh. *Kedua*, kami mengucapkan kepada Arsip Nasional Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk mengambil data-data tentang Keresidenan Pekalongan. Dalam hal ini peranan saudara Harto Juwono sangat penting dalam menelusuri sumber Magelang masa Kolonial. *Ketiga*, ucapan terima kasih disampaikan kepada pengelola Museum Batik di Pekalongan yang telah memberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan dan mengambil gambar motif–motif batiknya. *Keempat* kami sampaikan terima kasih kepada kepala Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Kebudayaan Kota Pekalongan yang bekerjasama dalam kegiatan penelitian ini.

Secara khusus saya sampaikan banyak terima kasih kepada Thomas Lindblad. Pada tahun 2010 saya berkesempatan untuk mengikuti program *Academic Recharging*(PAR) di Leiden, ketika itu sebagian naskah dari buku ini mendapat masukan dari beliau karena untuk dikirim dalam publikasi internasional.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bu Wiwik, mantan mahasiswa S-2 Pendidikan IPS yang membantu pengambilan data. Sebagian data itu dimanfaatkan untuk kepentingan tesis dan penelitian lain di lingkungan Unnes, karena dalam kerangka riset payung Hibah pasca sarjana yang sedang saya kembangkan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pemberi bahan sekunder. Pak Agus Supriyono yang secara khusus meminjami bahan tentang batik. Pak Tejo memberikan buku yang berasal dari disertasinya tentang Pekalongan. Khusus kepada Prof Joko Suryo saya harus berterima kasih karena makalahnya tentang Sejarah Kota Pekalongan sangat membantu menulis bahan bab II, tentang gambaran umum wilayah ini.

Data dalam buku ini semakin lengkap dengan data yang berasal dari hasil Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (yang kemudian menjadi bagian Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) tahun 2015 dan 2016. Sehubungan dengan hal itu ucapan terima kasih disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang yang telah memberi fasilitas penelitian, dan sebagian datanya untuk melengkapi buku referensi ini.

Kepada staf perpustakaan di KITLV, dan Perpustakaan Universitas Leiden saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Berkat kemudahan pelayanan dalam pengambilan data, buku ini dapat diselesaikan. Demikian pula dengan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada staf Arsip Nasional di Denhag yang dengan senang hati menyediakan data untuk keperluan penulisn buku ini.

Khusus kepada Mas Fadhil Nugroho Adi kami sampaikan terima kasih banyak. Atas bantuan anda dalam membaca kembali draft buku ini dan melakukan editing di sejumlah bagian, maka buku ini menjadi lebih baik.

Akhirnya ucapan terima kasih diucapkan kepada anak-anak. Akibat penelitian ini sebagian waktu untuk keluarga pasti terganggu

karena harus mengambil data di lapangan, baik di Indonesia maupun di Belanda.

Menyadari keterbatasan waktu yang disediakan, maka saya menyadari masih banyak kekuarangan dalam penyajian buku ini. Untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang akan diterima dengan tangan terbuka.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1795-1812 .....	26
Tabel 2.2	Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1830-1870 .....	27
Tabel 2.3	Komposisi Penduduk Pekalongan Berdasarkan Asal Suku Bangsa .....	29
Tabel 2.4	Kenaikan Penduduk Pekalongan 1857-1860 .....	30
Tabel 2.5	Petani Pemilik Sawah di Pekalongan 1856-1860 .....	31
Tabel 2.6	Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1871-1900 .....	32
Tabel 2.7	Penduduk Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1900-1942 .....	34
Tabel 3.1	Upah Menanam dan Sewa tanah di Kring Wonopringgo 1839-1839 (dalam gulden) .....	48
Tabel 3.2	Lahan Tebu di Pekalongan dan Perbandingannya dengan Karesidenan-karesidenan lain di Jawa tahun 1927 .....	52
Tabel 3.3	Pembakaran Tebu tahun 1926 .....	54
Tabel 3.4	Lokasi Pabrik Gula di Jawa bagian Tengah dan Jaringan Transportasi Kereta Api pada Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX .....	58
Tabel 3.5	Persediaan Barang di Beberapa Pelabuhan di Jawa Tengah Tahun 1926 .....	59
Tabel 3.6	Perolehan Gula Beberapa Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 1925 dan 1926 .....	60

Tabel 3.7	Pengiriman dengan Kapal ke Pelabuhan-Pelabuhan di Jawa Tengah Tahun 1926 .....	61
Tabel 3.8	Upah, Penyerahan, dan Sewa Tanah dan Pacht di Beberapa Karesidenan di Jawa Tengah .....	61
Tabel 4.1	Rata-rata Distribusi Sawah dan Tegalan per Desa di Jawa tahun 1815 (dalam bahu). .....	67
Tabel 4.2	Perkembangan Lahan Sawah Irigasi dan Perbandingannya dengan Luas Lahan pada Akhir Abad XIX (000 hektar). .....	74
Tabel 4.3	Rasio Irigasi dan Panen Padi tahun 1880-an .....	75
Tabel 4.4	Lahan Garapan di Karesidenan Pekalongan dalam Hektare (x 1000), 1837-1855 .....	78
Tabel 4.5.	Penggunaan Lahan di Karesidenan Pekalongan dalam hektare (x 1000), 1866-1870 .....	80
Tabel 4.6	Penggunaan Lahan di Karesidenan Pekalongan Selama Tahun 1870-1880 dalam hektare (x 1000), .	81
Tabel 4.7	Produksi Gabah pada Masa Awal Tanam Paksa Selama Tahun 1837-1855 dalam Metrik Ton (x 1000) .....	82
Tabel 4.8	Produksi Gabah pada Masa Akhir Tanam Paksa Selama Tahun 1837-1870 dalam Metrik Ton (x 1000) .....	83
Tabel 4.9	Produksi gabah pada Masa Akhir Tanam Paksa Selama Tahun 1871-1900 dalam metrik ton (x 1000) .	84
Tabel 4.10	Pertumbuhan Lahan Pertanian Penduduk Pribumi dan Luas Panen 1866-1900 .....	86
Tabel 4.11	Wilayah Tanaman Padi Selama Tahun 1880-1900 (x 1000) .....	88
Tabel 4.12	Anggaran Rutin Berbagai Departemen (dalam jutaan gulden) .....	95
Tabel 4.13	Investasi Pekerjaan Irigasi Seluruh Jawa, 1880-1940 (1000 rupiah per hektar). .....	97
Tabel 4.14	Irigasi Teknis di Jawa Tengah, 1910-1925 .....	98

Tabel 4.15	Lahan Tebu dan prosentase Irigasi untuk Tebu di Jawa Tahun 1910 dan 1925 .....	99
Tabel 4.16	Perbandingan Luas Areal Irigasi, Tanaman Padi, dan Tanaman Tebu di Jawa .....	100
Tabel 4.17	Staf Peneliti Senior di Pusat Penelitian Pertanian Umum, 1906-1942 .....	104
Tabel 4.18	Personel Pegawai Perluasan Pertanian, 1908-1942 ..	108
Tabel 4.19	Rata-rata Penduduk Buta Huruf 1920-1942 (prosentase) .....	112
Tabel 4.20	Permintaan Kredit Pedesaan di Wilayah-wilayah Utama, 1930 .....	120
Tabel 4.21	Tanah Garapan (total dan sawah) dalam Hektare (x1000), 1916-1940 di Karesidenan Pekalongan ....	121
Tabel 4.22	Lahan Tanaman Padi yang Dipanen dan Wilayah Tanam dalam Hektare (x 1000) 1916-1942 .....	123
Tabel 4.23	Produksi Padi Gabah dalam Metrik Tons (x 1000) 1916-1942 .....	125
Tabel 4.24	Lahan Palawija yang Ditanam dalam Hektare (x 1000), 1916-1942 .....	127
Tabel 5.1	Nama-nama Perahu, Bobot, dan Pemiliknya .....	130
Tabel 5.2	Jumlah Nelayan di Karesidenan Pekalongan 1857-1864 .....	135
Tabel 5.3	Jumlah dan Kepemilikan Kapal Nelayan di Karesidenan Pekalongan tahun 1863 .....	137
Tabel 5.4	Estimasi Tangkapan Ikan di Karesidenan Pekalongan 1830-1860 .....	138
Tabel 5.5	Jumlah Nelayan Pemilik Perahu, Desa Nelayan, dan Penduduk di Wilayah Karesidenan Pekalongan Tahun 1895-1903 .....	140
Tabel 5.6	Jumlah Perahu Mayang dan Perahu Jenis Lainnya di Residensi Pekalongan Tahun 1895-1903 .....	141
Tabel 5.7	Harga <i>Jukung</i> di Rembang Tahun 1904 .....	142
Tabel 5.8	Jumlah Perahu di Wilayah Organisasi Mino Sojo Tahun 1937 dan 1938 .....	143

Tabel 5.9	Musim dan Alat yang Digunakan di Sekitar Laut Pekalongan .....	146
Tabel 5.10	Hasil Pelelangan Ikan dan Pendapatan Kotor di Residensi Pekalongan Tahun 1937-1940 .....	155
Tabel 5.11	Jumlah dan Ukuran Perahu di Residensi Pekalongan Tahun 1940 .....	156
Tabel 6.1	Jumlah Perusahaan Batik di Pekalongan Tahun 1927 175	
Tabel 6.2	Desa-desa Batik yang Ada di Pekalongan .....	176
Tabel 6.3	Impor Kain di Pekalongan Tahun 1905-1907 .....	178
Tabel 6.4	Impor Kain di Pelabuhan Semarang tahun 1905-1907 .....	179
Tabel 6.5	Impor Kain di Pelabuhan Cirebon Tahun 1905-1907	180
Tabel 6.6	Gabungan Total Kain Impor di Pelabuhan Pekalongan, Semarang, dan Cirebon Tahun 1905-1907 .....	180

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Lingkungan Pabrik Gula Wonopringgo .....	45
Gambar 3.2	Pengairan dan Ladang Tebi di Sragi, Pekalongan .	53
Gambar 5.1	Perahu Mayang di Sungai Pekalongan, 1890 .....	132
Gambar 5.2	Pelabuhan Pekalongan 1911 .....	158
Gambar 5.3	Kantor Tol di Sungai Pekalongan .....	159
Gambar 6.1	Motif-motif Pengaruh Cina .....	185
Gambar 6.2	Motif-motif Pengaruh India .....	191
Gambar 6.3	Motif-motif Pengaruh Timur Tengah .....	195
Gambar 6.4	Motif-motif Pengaruh Belanda .....	197
Gambar 6.5	Motif-motif Pengaruh Jepang .....	201

# DAFTAR ISTILAH

<i>Afdeeling</i>	: wilayah administratif setingkat kabupaten.
Akulturasi	: proses sosial berupa keberterimaan budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli.
<i>Algemeen Proefstation voor de Landbouw</i>	: Lembaga Umum dalam Riset Pertanian
<i>Algemeene Verslag</i>	: laporan umum
<i>Algemeene Volkscredit Bank</i>	: Bank Kredit Rakyat Umum
<i>Ani-ani</i>	: pisau yang digunakan untuk memotong padi
Batik Belanda	: batik yang dibuat oleh para wanita pengusaha Indo-Eropa.
<i>Blandong</i>	: penebang kayu
<i>Blawu</i>	: warna biru pada batik.
<i>Canthing</i>	: alat untuk membatik berupa penyendok lilin yang bercepat, dibuat dari tembaga.
<i>Cash crops</i>	: tanaman perdagangan
<i>Cecek</i>	: titik-titik pada motif batik.
<i>Centrale Kas</i>	: kas pusat
<i>Cultuur Stelsel</i>	: tanam paksa

<i>Demplot</i>	: lahan demonstrasi
<i>Drogen van visch</i>	: ikan kering
Ekspor	: proses transportasi barang atau komoditas dari satu negara ke negara lain.
<i>Food crops</i>	: tanaman pangan
<i>Gading</i>	: tulang kerangka pada badan perahu, disebut juga dengan <i>tajuk</i> .
<i>Gemeente</i>	: kotapraja
<i>Glebagan</i>	: penanaman bergilir
<i>Hoofdplaats</i>	: ibu kota
<i>Iba-iba</i>	: papan yang berfungsi sebagai tempat duduk penumpang perahu.
Impor	: proses memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.
<i>Inzouten van visch</i>	: ikan asin
<i>Isen-isen</i>	: bagian yang masih kosong pada kain yang diisi dengan ragam hias batik.
<i>Jlamprang</i>	: motif batik geometris khas Pekalongan.
<i>Juragan</i>	: sebutan untuk pengusaha atau majikan.
<i>Keraton</i>	: istana
<i>Kilin</i>	: anjing berkepala naga
<i>Klaverblad</i>	: lambang pembawa keberuntungan
<i>Koloniaal verslag</i>	: laporan kolonial
<i>Landbouw Consulente</i>	: Konsultan Pertanian
<i>Landbow Voorlichtingsdienst</i>	: Dinas Penerangan Pertanian

<i>Mangsa</i>	: musim ikan
<i>Ngemplongi</i>	: tindakan memukul kain batik untuk memperhalus kain.
<i>Nitik</i>	: motif batik geometris
<i>Onderdistrik</i>	: daerah kecamatan
<i>Pantura</i>	: pantai utara
<i>Parintah Alus dan Parintah Keras</i>	: cara berkomunikasi yang dilakukan ahli pertanian terhadap para petani.
<i>Proefstation voor Rijst and Tweede Gewassen</i>	: Pusat Penelitian Padi dan Tanaman Perdagangan Lain
<i>Tokwi</i>	: alas meja sembahyang masyarakat Cina.
<i>Topografi</i>	: bentang alam
<i>Verenigde Oost Indische Compagnie</i>	: organisasi dagang swasta Belanda.
<i>Volkscreditwezen</i>	: Kredit Rakyat
<i>Vorstenlanden</i>	: daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.



# DAFTAR ISI

Prakata .....	v
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Istilah .....	xiv
Daftar Isi .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Pendahuluan .....	1
Metode Kajian .....	8
Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) .....	9
<b>BAB II PEKALONGAN</b> .....	13
Asal-usul Wilayah .....	13
Menjadi Kota Kabupaten dan Karesidenan .....	17
Menjadi Kota <i>Gemeente</i> dan <i>Stadsgemeente</i> .....	20
Perkembangan Wilayah .....	21
Pertumbuhan Penduduk .....	26
<b>BAB III INDUSTRI GULA</b> .....	37
Awal Pertumbuhan .....	39
Masa Tanam Paksa dan Politik Kolonial Liberal .....	40
Masa Politik Kolonial Etis .....	51
<b>BAB IV TANAMAN PANGAN</b> .....	63
Kondisi Tanaman Pangan pada Abad XIX .....	64
Perkembangan Tanaman Pangan Abad XX .....	91
Kebijakan Kemakmuran .....	91

Menguatnya Perhatian Pemerintah .....	95
Pembangunan Sarana Irigasi .....	95
Penelitian Pertanian .....	101
Organisasi Pertanian .....	105
Ekstensifikasi Pertanian .....	106
Pendidikan Pertanian .....	111
Kredit Rakyat .....	114
Suplai Kredit Informal .....	115
Bank Distrik .....	116
Bank Desa .....	118
Produksi dan Konsumsi Pangan .....	121
Produksi Pangan .....	121
<b>BAB V EKONOMI NELAYAN .....</b>	<b>129</b>
Dunia Nelayan Pekalongan pada Abad XIX .....	129
Masa Penurunan pada Abad XX .....	139
Pelabuhan Pekalongan .....	157
<b>BAB VI INDUSTRI BATIK .....</b>	<b>165</b>
Antara Cerita dan Mitos .....	165
Muncul dan Perkembangannya .....	168
Akulturasi Budaya .....	181
Pengaruh Budaya Cina .....	183
Pengaruh Budaya India .....	190
Pengaruh Budaya Timur Tengah .....	192
Pengaruh Budaya Belanda .....	197
Pengaruh Budaya Jepang .....	200
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>205</b>
Daftar Pustaka .....	209
Biodata Penulis .....	217

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Pendahuluan**

Sampai saat ini banyak orang memandang bahwa sejarah adalah “politik masa lampau”. Pandangan ini masih mewarnai pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari kalangan ilmuwan yang kurang memahami dinamikailmu sejarah. Begitu besar image mereka tentang dominasi sejarah politik itu, hingga setiap keluar buku tentang sejarah menjadi menarik perhatian mereka. Dalam hal menanggapi buku baru selalu timbul sikap pro dan kontra tentang objektivitas sejarah yang sedang ditulis. Terutama yang tidak puas terhadap hasil penulisan sejarah itu kemudian menilai sebagai sejarah yang dipolitisasi, dimanipulasi, dan sebagai sejarah sosial kurang mendapat perhatian khusus.

Pandangan itu memang dapat dimengerti karena sejarah politik memang merupakan sebuah kajian sejarah yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Cerita-cerita dalam Babad, Hikayat, Lontar, dan karya-karya sejarah tradisional yang berkembang dalam masyarakat Indonesia di masa lampau merupakan sejarah politik, suatu sejarah yang memfokuskan pada masalah perebutan kekuasaan, pergantian penguasa, penaklukan wilayah, dan sebagainya. Pemikiran ini diperkuat dengan perkembangan historiografi kolonial yang ditulis dengan misi politik. Karya-karya sejarawan kolonial seperti De

Jonge, Collebrander, W.F Stafel, dan sebagainya memberikan indikasi kuat bahwa sejarah yang tepat ditulis dan diajarkan pada masyarakat adalah sejarah politik. Ketika itu tentu saja sejarah tentang keabsahan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia merdeka, orang Indonesia mulai tidak puas terhadap karya sejarah tulisan orang Belanda yang dianggap meracuni bangsa Indonesia. Untuk itu perlu ditulis sejarah dari kacamata orang Indonesia sendiri melalui konsep sejarah “Indonesia sentris”. Ketika itu muncullah karya-karya sejarah yang nasionalistik seperti 600 tahun Sang Saka Merah Putih oleh Mohammad Yamin, Sejarah Indonesia oleh Sanusi Pane, dan lain sebagainya. Begitu kuatnya arus nasionalisme pada waktu itu hingga melupakan kebenaran yang didasarkan pada data sejarah yang benar. Itulah sebabnya dalam perkembangan historiografi Indonesia muncul rasa ketidakpuasan terhadap penulisan sejarah politik yang nasionalis tersebut. Dalam Kongres Sejarah I tahun 1957 mulai dirumuskan penulisan sejarah Indonesia bersifat Indonesia sentries namun tetap ilmiah. Gema dan semangat penulisan sejarah yang ilmiah kritis itu mencapai titik jelasnya pada tahun 1970-an. Dengan dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo dikenalkanlah sejarah versi lain yang lebih *scientific*. Sejarah tersebut bukan sejarah politik, tetapi sejarah sosial. Sehubungan dengan hal itu tulisan ini akan mengupas konsep sejarah sosial, ruang lingkup, dan implikasi metodologisnya.

Secara konseptual sejarah sosial adalah studi tentang struktur dan proses tindakan serta tindakan timbal balik manusia sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio-kultural pada masa lampau yang tercatat (Abdullah, 1985:154). Berdasarkan konsep itu, maka sejarah tidak hanya sebuah cerita prosial dari waktu ke waktu tentang kejadian, tetapi juga penjelasan struktur masyarakat yang berbentuk dan melingkupi dalam setiap waktu. Dalam konteks sejarah konvensional, cerita hanyalah kronologi kejadian berdasarkan apa

---

1. Soedjatmoko, dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

yang tertulis dari sumber sejarah. Sementara sejarah sosial tidak puas terhadap model penceritaan seperti itu. Ide dasar dari sejarah sosial adalah bahwa masa lampau merupakan totalitas. Totalitas masyarakat itu hanya bisa dipahami oleh berbagai aspek dari kondisi masyarakatnya.

Cakupan sejarah sosial dalam perkembangan historiografi sangat beranekaragam. Herodotus, bapak sejarah, menulis sejarah perang Persia yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Athena, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, sampai dengan aspek kultural. Dengan demikian sejarah sosial merupakan penggambaran secara komprehensif seluruh kehidupan masyarakat waktu itu. Sementara itu Traveyan, sejarawan Inggris yang menulis *English Social History* melukiskan berbagai keseluruhan sejarah masyarakat tanpa mencantumkan kehidupan politik di dalamnya. March Bloch dan Lucian Febre dan mazhabnya yang disebut menurut majalahnya "Annales" pada awal abad XX merintis sejarah sosial dengan menulis masyarakat feodal (*Feudal Society*). Di Amerika Serikat Turner mempelopori sejarah sosial dalam karyanya yang berisi tentang penafsiran UUD Amerika secara ekonomi. Sementara itu pada tahun 1920-an, Robinson menulis *New History* dengan pendekatan yang meliputi berbagai kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Sejarah sosial juga terpengaruh tentang analisis Marx dan Engel. Pengaruh itu terkait dengan konsep perjuangan golongan sosial bawah terhadap eksploitasi, termasuk berbagai gerakan kaum buruh. Memang di dalam Marxistis, tema pertentangan itu menjadi tema pokok. Oleh karena itu ada kalanya sejarah sosial diartikan sebagai sejarah berbagai gerakan sosial, antara lain mencakup gerakan petani, buruh, mahasiswa, protes-protes sosial, dan sebagainya. Sementara itu gerakan nasionalis, gerakan agama, dan perjuangan berbagai aliran ideologi juga dikategorikan di dalamnya.<sup>3</sup>

---

2. Peter Burke, *History and Social Theory*, (Great Britain: T.J. Press (padstow) Ltd., 1992); Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 157.

3. Sartono Kartodirdjo, *Ibid.*, hlm. 157-158.

Sampai dengan tahun 1950-an cakupan sejarah sosial masih meliputi tiga hal, yaitu pertama, sejarah sosial menunjuk pada sejarah orang-orang miskin atau kelas bawah; kedua, sejarah sosial menunjuk pada uraian tentang aktivitas manusia seperti cara-cara, kebiasaan, kehidupan sehari-hari; ketiga, sejarah sosial mempunyai suatu ketentuan dengan sejarah ekonomi.<sup>4</sup>

Sampai saat ini penulisan sejarah sosial itu telah meluas lagi, hingga pada tahun 1960 saja Hobsbawn telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang telah digarap oleh sejarawan sosial. Mereka dapat diidentifikasi menjadi enam topik, yaitu demografi dan keluarga, studi tentang kota, kelas dan kelompok-kelompok sosial (misalnya modernisasi atau industrialisasi), serta pergerakan sosial dan fenomena dari proses sosial.<sup>5</sup>

Perkembangan sejarah sosial yang menemukan sosoknya kini tidak terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu sosial dan kemampuan. Ilmu-ilmu termasuk sejarah dirasa tidak cukup tanpa memperhatikan perkembangan ilmu lainnya, sebab pada dasarnya masyarakat bukanlah terpecah belah sebagaimana telah digeluti oleh tiap-tiap disiplin, tetapi mereka merupakan sebuah totalitas yang bergerak sepanjang zaman. Unsur naratif dalam sebuah karya sejarah memang merupakan intisari dan tubuh sejarah, tetapi kemampuan kritis penulis sejarah tentang latar belakang sosial budaya, kondisi sosial, faktor psikologi dan lain sebagainya telah menyebabkan perhatian khusus sejarawan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat *evenamental* atau “keperistiwaan”. Selain itu pertanyaan apa, siapa, bila dan di mana, dan biasanya diiringi dengan mengapa dan bagaimana, merupakan pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang menyeluruh. Sejarah konvensional yang hanya menekankan aspek naratif tentu tidak akan mampu

---

4. Hobsbawn, 1971, “From Social History to History of Society”, *Daedalus*, Volume 100, No. 1, hlm. 20-25.

5. *Ibid.*, hlm. 33-35.

menjawab permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu.<sup>6</sup>

Untuk itu ada beberapakategori yang diperhatikan dalam menulis sejarah. Dengan meminjam kategori-kategori masalah yang diuraikan oleh H.J. Perkin (1962) dapat mempermudah kita dalam mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang bisa diungkap dalam sejarah sosial. Menurutnya masyarakat dapat dianalogikan dengan suatu organisme. Sejarah sosial yang membidik masyarakat sebagai penelitiannya seharusnya memperhatikan unsur-unsur ekologi, anatomi, fisiologi, patologi, dan psikologi). Dengan mengacu pada konsep-konsep itu dapat diidentifikasi unsur-unsur yang bisa diungkap dalam penulisan sejarah sosial.

**Pertama**, lingkungan alamiah dari masyarakat yang diteliti. Dalam konteks sejarah Asia Tenggara, telah lama didasari adanya perbedaan struktural dan tentunya pola perilaku sejarah antara masyarakat yang hidup di “dataran rendah” dan “pegunungan” dan antara masyarakat “pesisir” dan “pedalaman”. Sejarah negeri-negeri di Asia Tenggara seperti Kamboja, Muangthai, Myanmar, dan Indonesia, tidak akan dapat dimengerti tentang kondisi ekologisnya. Itulah sebabnya Van Leus pada tahun 1930-an menggunakan konsep-konsep sosiologis Max Weber untuk menguraikan sejarah Indonesia dan Asia Tenggara telah memperkenalkan tipologi ekologi antara kerajaan maritime dengan kerajaan agraris. Pemahaman ekologis juga terjadi antara “desa” dan “kota”, daerah “sawah” dan “ladang”, dan lain sebagainya.

**Kedua**, corak struktur dari masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan antara lain: bagaimana pelapisan sosial masyarakatnya, apakah dasar pelapisan sosialnya, bagaimana dampak pelapisan sosial itu terhadap tata hidup masyarakatnya, berapakah jumlah penduduk dan bagaimana penyebarannya, apakah penyebab penduduk itu telah sesuai dengan jumlah sekolah yang tersedia, apakah sistem ekonomi

---

6. Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 315.

yang dipakai, dan sebagainya yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan “anatomi sosial”. Dengan demikian yang dimaksud “struktur” tidak hanya gambaran masyarakat yang “datar” dan “statis”, tetapi juga suasana saat individu hidup dan bergerak dalam lingkungan sebuah struktur sosial. Hal itu dapat disoroti mulai dari keluarga sampai klub tenis atau politik, mulai dari tempat ibadah sampai dengan pasar.

**Ketiga**, fungsi dari struktur itu. Selain menguraikan tentang kondisi struktur sosial, unsur yang membantu kita dalam mengungkap sejarah sosial ialah pemahaman atas bagaimana sebuah struktur itu berfungsi. Dalam pemikiran sosiologis aliran struktural dikatakan bahwa masyarakat sebagai isi dari sebuah struktur akan dibentuk dan diarahkan oleh struktur sosial yang melingkupinya. Fungsi dari struktur itu didukung dari aspek fungsional yang terwadahi dalam sebuah masyarakat yang mendukung keberlangsungan sebuah struktur.

**Keempat**, problema sosial dan usaha untuk menguasainya. Problema-problema sosial itu antara lain problema kebodohan, kemelaratan, kelaparan, epidemik, pecahnya keluarga, proses proletarisasi dan sebagainya. Problem-problem itu sebenarnya telah dikenal oleh sejarawan konvensional seperti ketika orang menulis tentang sejarah terbentuknya Budi Utomo untuk melawan kebodohan dan kemelaratan, hanya saja fokus studi sejarah sosial bukan pada sejarah orang perorang, tetapi pada problem yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat. Problem sosial yang menjadi bahasan sosial juga dikaitkan dengan pranata-pranata dan kelembagaan sosial sebagai mekanisme untuk menangkal serta menguasai masalah-masalah yang bersifat patologis hingga persoalan kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan, sampai dengan ruang praktik dukun merupakan pranata-pranata yang berkaitan dengan pemecahan problema sosial yang berupa wabah penyakit seperti pes, desentri, dan sebagainya. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan padepokan, merupakan tempat menempa problem kebodohan, dan lain sebagainya.



**Kelima**, pemahaman tentang psikologi masyarakat. Pengertian ini mengacu pada makna dan nilai yang dipegang oleh masyarakat sejarah sosial diharapkan memperhatikan sistem pemikiran agama, sastra, mitos, dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan karena ketika seseorang sedang membahas misalnya tentang problema kependudukan, yakni pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, selain dari aspek struktural seperti terjadinya kondisi aman setelah tiadanya perang-perang besar pada masa Tanam Paksa.<sup>7</sup>

Di antara sekian cakupan sejarah sosial tersebut, sejarah sosial ekonomi menjadi aspek penting dalam kajian sejarah Indonesia. Sejarah sosial ekonomi memadukan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek perkembangan dan implementasi ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian konsepsi sejarah ekonomi yang mencakup dua ranah, yakni: perubahan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, stagnasi ekonomi, atau kemunduran suatu negara, dan apa yang terjadi dengan masyarakat negara tersebut selama pertumbuhan, stagnasi, atau kemunduran ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam ranah yang pertama, sejarah ekonomi dapat dikaji secara makro, sementara dalam ranah yang kedua, dapat dikaji secara mikro. Buku yang sampai di tangan pembaca ini merupakan kajian sejarah sosial ekonomi Pantai Utara Jawa di wilayah Pekalongan yang pada masa Kolonial masuk dalam administrasi keresidenan. Kajian ini merupakan kajian sejarah ekonomi secara mikro. Kajian mikro ekonomi untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi nasional masa kolonial itu terjalin dengan perilaku ekonomi masyarakat di wilayah yang lebih kecil. Pekalongan merupakan wilayah yang pada masa Kolonial Belanda memiliki dinamika ekonominya sendiri mensintesis kebijakan ekonomi Kolonial dan melahirkan perilaku ekonomi sendiri yang berbasis keunggulan lokalnya. Kebijakan ekonomi nasional dalam bentuk tanaman tebu dan industri gula berkembang secara baik di wilayah ini. Sementara itu ekonomi lokal

---

7. *Ibid.*, hlm. 316.

8. Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*, Jakarta: Kompas, 2012, hlm. vii-xv.

yang dikembangkan masyarakat setempat seperti pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri batik juga berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi kebijakan negara.

## Metode Kajian

Buku yang sampai di tangan pembaca merupakan kompilasi dari hasil riset. Penelitian *pertama* berkaitan dengan sejarah kebijakan ekonomi dan pertumbuhan tanaman pangan tahun 1990 yang didanai oleh UGM dan Universitas Leiden. *Kedua*, penelitian kebijakan pangan yang dilakukan atas dana dari Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pariwisata tahun 2010. *Ketiga*, penelitian hibah bersaing bertema Pembelajaran Sejarah Berbasis Museum dengan dana penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Keempat*, Penelitian Sejarah Ekonomi Desa Pekalongan dengan dana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2010.

Kecuali penelitian tentang museum, semua menggunakan metode sejarah. Sebagai riset sejarah, penelitian menggunakan prosedur penelitian sejarah mulai dari proses penggalan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.<sup>9</sup> Penelusuran sumber sejarah dilakukan di Indonesia maupun di Belanda. Di Indonesia dilakukan di Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Koleksi Reksopustoko Mangkunegaran, dan Koleksi Museum Batik di Kota Pekalongan. Di Belanda, penelusuran sumber dilakukan di Perpustakaan KILV Leiden dan Arsip Nasional Den Haag. Kritik sumber dilakukan dengan memahami otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Hasil dari kritik sumber berupa fakta sejarah yang merupakan pendapat penulis tentang kejadian dan makna kejadian di balik sumber sejarah. Fakta sejarah yang sifatnya terpisah tersebut ditafsirkan hubungannya sehingga memiliki keterkaitan sejarah yang memiliki makna. Historiografi dilakukan dengan menyusun tulisan sejarah dengan model tematik dan kronologis, tema-tema

---

9. Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*, (Semarang: Unnes Press, 2007).

yang dikembangkan berdasarkan aspek ekonomi yang berkembang di wilayah Pekalongan pada periode Kolonial Belanda, yakni perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri batik.

Khusus pada kajian batik dalam riset yang didanai tahun 2010 dilakukan dengan penelitian kepustakaan sejumlah museum di Jawa Tengah, termasuk di Museum Batik Kota Pekalongan yang produksinya diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Penelitian ini memayungi riset-riset tesis mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Pendidikan IPS, Universitas Negeri Semarang. Sebagian kajian pustaka riset digunakan sebagai materi sajian dalam buku ini.

## **Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura)**

Dalam peta Jawa Tengah, Pekalongan dikategorikan sebagai wilayah Pantai Utara Jawa atau Pantura. Imajinasi orang tentang Pantura memiliki makna khusus berbeda dengan daerah pedalaman Jawa. Begitu khususnya tentang Pantura, maka ada istilah-istilah yang khas yang mencerminkan wilayah ini seperti: “jalan pantura”, “dangdut pantura”, “musik pantura”, makanan khas “pantura”, “wisata pantura”, “ekonomi pantura”, dan bahkan “preman pantura”.

Istilah Pantura menurut Endah Sri Hartatik<sup>10</sup> berasal dari konsep “pasisir” dalam tradisi kebudayaan Jawa. Konsep ini muncul dalam geografi politik dalam Kerajaan Mataram membagi wilayah menjadi empat lingkaran konsentris, yaitu: *Kuthagara*, *Negara agung*, *Mancanegara*, dan *Pesisir*. Struktur paling dalam adalah wilayah *Kuthagara*, kemudian diikuti dengan wilayah *Negara Agung*, *Mancanegara*, dan akhirnya *Pesisir*.<sup>11</sup> *Kuthagara*, berasal dari kata “kota” “negara” mengacu pada wilayah tempat tinggal raja, tempat organisasi pemerintahan dikendalikan. *Negara Agung* adalah wilayah lingkaran

---

10. Endah Sri Hartatik, “Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam hingga Pemerintahan Daendels”, *Pamaramia: Historical Studies Journal*, Volume 26 nomor 2, Semarang: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang,, 2016.

11. Wasino, *Wong Jawa dan Wong Cina, Liku-liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998*, (Semarang: Unnes Press, 2006).

kedua, tempat kekuasaan raja sangat kuat dan tempat tanah gaji para pejabat kerajaan berada. *Mancanegara* merupakan daerah lingkaran ketiga yang secara kekuasaan berada di tangan para bupati, wakil dari raja di daerah-daerah tersebut.

Konsep pesisir tersebut dalam perkembangannya berubah menjadi jalan wilayah pantai utara atau Pantura. Konsep pantai utara pertama kali diasosiasikan dengan Jalan Raya Pos, sebuah jalan raya yang dibangun oleh Daendels (1808-1811) yang sebagian besar melalui pantai utara Jawa. Meskipun demikian sebutan pantura baru muncul pada tahun 1924 dalam sebuah majalah populer di Belanda, *Indie*. Pantura untuk pertama kali digunakan untuk menyebut wilayah transportasi khusus yaitu “*Noord-Midden Java*” (Jawa Tengah bagian utara). Meskipun demikian, sebutan Pantura menguat sekitar tahun 1980-an sejalan dengan perkembangan transportasi darat yang melalui jalan raya pos itu semakin padat.<sup>12</sup>

Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Posisi demikian telah ada sejak disebut pesisir barat dari Mataram pada masa kolonial Belanda hingga pascakemerdekaan. Pekalongan dalam historiografi Mataram selalu dikaitkan dengan tokoh Bahurekso. Tokoh ini dikenal sebagai kepala wilayah di Pesisir Barat dalam lingkungan birokrasi kerajaan Jawa tersebut. Tokoh ini juga menjadi panglima perang dalam serangan Mataram terhadap VOC pada tahun 1626.

Sebagai wilayah pesisir utara Jawa, Pekalongan terkait dengan jalur transportasi pantai utara. Jalur pantai merupakan jalur tertua dan melahirkan masyarakat maritim Pekalongan yang penghidupannya terkait dengan dunia perikanan dan maritim. Jalur darat juga berkembang sejak masa Mataram, masa VOC, Kolonial Belanda hingga Orde Baru. Jalur darat pertama dibangun oleh Kerajaan Mataram dan berkembang pesat pada masa Sultan Agung yang menghubungkan Kota Raja Mataram di Yogyakarta melalui Temanggung, Subah,

---

12. Endah Sri Hartatik, 2016, *Sejarah Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah tahun 1900-1990-an*, Disertasi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, UGM, Yogyakarta.

Pekalongan dan Tegal. Pada masa Daendels (1808-1811) jalur darat bergeser dari Pekalongan menuju Semarang melalui Alas Roban atau Plelen. Sementara itu angkutan kereta Api Cirebon-Semarang juga mulai dikembangkan pada akhir abad XIX melalui wilayah Pekalongan.<sup>13</sup>

Perubahan transportasi yang melalui wilayah Pekalongan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah ini. Komoditas-komoditas berkembang karena memudahkan distribusi ke luar Pekalongan. Komoditas yang berkembang meliputi industri gula hingga batik.

---

13. Endah Sri Hartatik, 2016, *Sejarah Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah tahun 1900-1990-an*, Disertasi, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, UGM, Yogyakarta., bab II.



# BAB II

## PEKALONGAN

### Asal-usul Wilayah

Pada saat ini, istilah Pekalongan mengacu pada dua wilayah pemerintahan, yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Di masa lalu, batasan seperti ini tidak terjadi karena kedua wilayah itu merupakan satu kesatuan, bahkan wilayahnya lebih luas dari kondisi sekarang.

Istilah Pekalongan menurut beberapa sumber tidak selalu memiliki asal-usul sama. Sebutan Pekalongan dapat dijumpai dalam catatan perjalanan *Poerwa Lelana*, seorang pangeran Mataram yang melakukan perjalanan hingga wilayah ini. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa “Pekalongan” merupakan turunan dari kata *along*, suatu kata yang menurut Sutejo Kuwat Widodo (2005) sangat dekat dengan dunia kenelayanan, yang artinya memperoleh hasil tangkapan ikan di laut. Dalam bahasa Jawa *kromo*, suatu tataran tertinggi dalam bahasa Jawa, *along* mempunyai pengertian *pengangsalan* yang hampir mirip dengan pendapatan atau *income*. Sampai sekarang, *along* merupakan sebutan umum yang digunakan untuk menamakan hasil penangkapan dalam jumlah besar atau banyak oleh masyarakat nelayan di kawasan pantai utara Jawa bagian tengah. Kecuali sampai Tuban menggunakan

sebutan *along* untuk menamakan keberhasilan dalam melakukan penangkapan ikan di laut.<sup>14</sup>

Versi lain, yaitu Babad Pekalongan, kelahiran desa yang kemudian menjadi Kota Pekalongan berkaitan erat dengan kisah tokoh Jaka Bahu berasal dari Kesesi, yang disuruh pamannya Ki Cempaluk untuk mengabdikan kepada Sultan Agung, Raja Mataram. Jaka Bahu mendapat tugas untuk memboyong Putri Ratamsari dari Kalisalak (Batang) ke istana, akan tetapi Jaka Bahu jatuh cinta pada putri tersebut. Sebagai hukumannya Jaka Bahu diperintahkan untuk mengamankan daerah pesisir yang terus diserang oleh Bajak Laut Cina. Ia berganti nama menjadi Bahu Reksa, dan mendapatkan perintah dari Sultan Agung untuk mempersiapkan pasukan dan membuat perahu untuk membentuk armada yang kemudian melakukan serangan terhadap Kumpeni yang ada di Batavia (1628 dan 1629). Setelah mengalami kegagalan untuk memenangkan pertempuran dengan Belanda di Batavia, Bahu Reksa memutuskan untuk kembali dan bertapa *Ngalong* (bergantung seperti kelelawar) di Hutan Gembira. Dari tempat dan cara bertapa di Hutan Gembira itulah Kota Pekalongan kemudian lahir. Sumber yang sama, juga menyebutkan bahwa seorang Cina bernama Tan Kwie Jan, yang meminta izin kepada Raja Mataram untuk berdagang di Kota Pekalongan dan bertemu dengan Jaka Bahu di Hutan Gembira. Tan Kwie Jan ini kemudian disebut-sebut menjadi Bupati Kota Pekalongan dengan nama Jayaningrat.<sup>15</sup>

Kebenaran asal-usul istilah itu memang diperdebatkan karena sama-sama bercampur mitos dan realitas. Data historis menunjukkan bahwa sampai abad ke-16 wilayah Pantai Pekalongan dan sekitarnya masih merupakan daerah yang jarang dihuni penduduk, dan masih banyak tertutup hutan belantara. Sementara di daerah lain, yaitu Demak, Jepara, Kudus, dan Pati telah berkembang menjadi daerah penting. Wilayah Pantai Pekalongan berkembang setelah daerah

---

14. Sutejo K Widodo, *Ikan Layang Terbang Menjulung*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005).

15. Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*, (Yogyakarta: SPTN Press, 2009), hlm. 117-129.



pedalaman yang terletak di perbukitan tumbuh menjadi pedesaan yang makmur. Tome Pires menyebutkan bahwa wilayah pedesaan Pekalongan dikuasai oleh seorang pangeran muslim dari Kerajaan Demak (Tome Pires).

Menurut Djoko Suryo (2009), perkembangan wilayah Pekalongan dan wilayah pesisir lainnya mengalami peningkatan pada awal abad ke-17, bersamaan dengan perluasan wilayah Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung (1613-1645). Schrieke secara rinci menggambarkan adanya hubungan antara pusat kerajaan dengan wilayah pesisir yang dikuasai oleh Mataram melalui jalur darat yang menjulur dari kota istana ke Kota Tegal, Pemalang, Kendal, dan Jepara<sup>16</sup>.

Pada waktu kebesaran Mataram di bawah Sultan Agung, wilayah yang kemudian disebut Pekalongan ini tunduk pada kekuasaan Mataram. De Haan, seorang Belanda yang pada 1622 melakukan perjalanan Ke Mataram lewat daerah Pesisir Utara Jawa ini, menyebutkan bahwa daerah Pekalongan pada masa itu telah diperintah oleh Pangeran Mandureja dan pada 1623 digantikan oleh pangeran Upasanta. Keduanya merupakan pejabat teras Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Seperti halnya Bahu Reksa, Mandureja dan Upasanta juga ditunjuk menjadi laksamana perang untuk menyerang Kumpeni di Batavia. Sementara itu *Serat Raja Purwa* juga menyebutkan bahwa Pekalongan kemudian diperintah oleh Adipati Jayadiningrat. Menurut Nagtegaal, dalam *Riding the Dutch Tiger* (1988), menyebutkan bahwa berturut-turut Bupati Pekalongan dijabat oleh keluarga besar Jayadiningrat, yaitu Jayadiningrat I (1707-1726), Jayadiningrat II (1726-1743), Jayadiningrat III (1743-1759), Jayadiningrat IV (1759-tidak diketahui).<sup>17</sup>

Penguasaan Mataram atas wilayah Pekalongan tidak hanya berpengaruh terhadap aspek politik saja, tetapi juga kebudayaan. Banyak unsur kebudayaan Istana Jawa ikut berpengaruh di lingkungan kehidupan Kota Pekalongan. Unsur-unsur kebudayaan istana yang

---

16. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies* (Part two), The Hague dan Bandung: W van Hoeve Ltd, 1957.

17. *Ibid.*

dimaksud antara lain tercermin dalam penataan tata-ruang kota, bangunan arsitektural rumah para pejabat, seni kerajinan batik, seni pertunjukan serta unsur kesenian lainnya. Penataan tata ruang kota yang berpusat pada rumah kediaman bupati beserta alun-alun menghadap ke arah utara, dan dilengkapi dengan mesjid yang berdiri di sebelah kiri alun-alun beserta Kampung Kauman, menggambarkan sebuah model tiruan atau maket kecil dari tata ruang Kota Istana Mataram di pusat kerajaan. Sejumlah toponim di Kota Pekalongan menunjukkan adanya kaitan dengan kedudukan dan fungsi khusus dalam struktur administrasi pemerintahan Jawa di tingkat kabupaten, seperti yang tercermin dalam nama-nama kampung Kraton, Krapyak, Sarangenan, Kepatihan, dan sebagainya. Demikian pula secara artefaktural juga banyak peninggalan-peninggalan dari masa Kerajaan Demak dan Mataram lainnya terdapat di Kota Pekalongan dan sekitarnya.

Pengaruh budaya Islam cukup kuat di wilayah Pekalongan. Pengaruh ini selain faktor keberadaan kekuasaan Mataram, juga pengaruh masa Kerajaan Demak. Wilayah Pekalongan telah berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Santri, yang kini dapat ditemukan baik dalam bentuk pusat-pusat pendidikan Islam modern maupun pusat pendidikan Islam model tradisional, seperti yang tercermin dalam bentuk pesantren-pesantren yang tersebar dari wilayah kota sampai ke pedesaan. Sudah barang tentu tokoh-tokoh Kyai atau Ulama Pekalongan memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam dinamika kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan di daerah perkotaan dan pedesaannya. Sejak awal abad ke-20 Kota Pekalongan telah menjadi wilayah Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, di samping pergerakan partai-partai politik pada zaman pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Kota Pekalongan telah berkembang secara dinamis dari masa-masa awal baik dalam kegiatan nasional ekonomi, politik maupun kultural. Segi-segi yang khas dari orang Pekalongan dan yang

menjadi identitasnya antara lain adalah dialek bahasa tuturnya, gaya pakaian, gaya hidup, dan corak hubungan pergaulan sosialnya.<sup>18</sup>

Sesungguhnya Kota Pekalongan telah berkembang ketika Islam menjadi ikon peradaban masa Demak dan Mataram. Kota ini makin berkembang menjadi kota pantai, ketika Daerah Pesisir Utara Jawa jatuh ke tangan VOC dari kekuasaan Kerajaan Mataram setelah berakhirnya Pemberontakan Cina pada 1743. Di bawah kekuasaan VOC Kota Pekalongan meningkat menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan bagi komoditas ekspor di wilayah Pekalongan, seperti beras, gula, dan nila, dan sebaliknya barang impor dari luar bagi wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Sejak itu Pelabuhan Pekalongan ditangani oleh seorang Syahbandar, yang umumnya orang Cina.<sup>19</sup> Sejak itu banyak pendatang Cina datang ke wilayah Pekalongan untuk usaha pertanian dan perdagangan. Kehadiran orang-orang Cina ini telah memberi kontribusi bagi ramainya kota pelabuhan di pantai utara Jawa ini.

## **Menjadi Kota Kabupaten dan Karesidenan**

Sejak 1800, Kota Pekalongan menduduki posisi sentral yaitu menjadi ibu kota dua wilayah administrasi pemerintahan pada tingkat kabupaten dan tingkat karesidenan. Kedudukan ganda tersebut telah menjadikan Kota Pekalongan semakin berkembang dan menduduki tempat strategis, baik dalam bidang administrasi pemerintahan kolonial, maupun dalam bidang perekonomian dan politik.

Pada awal abad XX, wilayah Pekalongan juga dikuasi langsung oleh Pemerintahan Belanda. Gubernur Jendral Daendels (1808-1811) mengadakan reorganisasi pemerintahan dengan membentuk kesatuan administrasi pemerintahan prefektur, yang pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) diganti dengan sistem residensi (*residency*), yang selanjutnya diteruskan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda

---

18. *Ibid.*

19. Kwee Hui Kian, *The Political Economy of Java's Northeast Coast, c.1740-1800: Elite Synergy*, Leiden-Boston: Brill, 2006.

sejak 1816. Pada masa awal wilayah, Pesisir Utara Jawa bagian barat dibagi menjadi dua wilayah karesidenan, yakni wilayah Karesidenan Tegal dan Karesidenan Pekalongan. Karesidenan Tegal membawahi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, sementara Karesidenan Pekalongan membawahi Kabupaten Pekalongan dan Batang. Pada akhir abad ke-19 kedua karesidenan itu digabung menjadi satu karesidenan, yaitu Karesidenan Pekalongan dan berlangsung hingga masa wilayah karesidenan di Indonesia dihapuskan sekitar tahun 1950-an.

Sentralitas Kota Pekalongan atas wilayah karesidenan cukup penting bagi perkembangan Kota Pekalongan sendiri. Tata ruang kota makin meluas, demikian halnya dengan wilayah teritorial kota yang sejalan dengan perkembangan penduduk kota dan kepadatan serta kesibukan kota yang semakin meningkat sejak awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Semenjak itu banyak gedung-gedung baru dibangun untuk kediaman redisen, kantor karesidenan, kantor pengadilan, kantor perpajakan, perdagangan dan kantor-kantor lainnya di wilayah Kota Pekalongan.<sup>20</sup>

Pada masa Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* (1830-1870), wilayah Pekalongan menjadi basis penanaman tebu utama yang diikuti dengan pembangunan sejumlah pabrik gula. Ketika itu keramaian kota makin meluas dan meningkat. Tidak hanya di pinggir pantai, tetapi juga di wilayah pedalaman. Ketika itu jaringan industri perkebunan antara pedalaman sebagai pusat industri perkebunan dengan daerah pantai sebagai pelabuhan dikembangkan.

Menurut Bleeker, pada tahun 1845 penduduk Kota Pekalongan terdiri atas 332 orang Eropa, 235.535 orang Jawa, 2.434 orang Cina, 180 orang Melayu dan Benggali, 366 orang Arab, dan 129 orang Budak.<sup>21</sup> Dapat dikemukakan bahwa pada masa itu Kota Pekalongan mencapai puncak perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi

---

20. Djoko Suryo, *Op.cit.*, hlm. 123-124.

21. *Tijdschrift van Nederlandsch – Indie* (TNI), 1848, hlm. 109, hlm. 265.

administrasi pemerintahan, maupun dari segi ekonomi, sosial, politik dan kultural.

Hubungan pedalaman dengan pantai terus berlangsung ketika haluan politik kolonial berubah menjadi politik Kolonial Liberal (1870-1900). Zaman baru ini telah memperluas penanaman modal swasta asing di wilayah Pekalongan dalam bentuk pembukaan perusahaan perkebunan tebu, indigo, dan kopi. Sejak masa Tanam Wajib dan masa perkebunan itu pula telah banyak didirikan pabrik-pabrik gula (Wonopringgo, Tirto, Kalimati, Sragi, dan Comal), pembuatan jalan dari kota ke pedalaman, saluran irigasi, dan bahkan pada awal tahun 1900-an dibangun jalan kereta api dari Kota Pekalongan ke pedalaman Wonopringgo, setelah Kota Pekalongan juga dilalui jalan kereta Api dari Semarang ke arah Cirebon. Kesemuanya ini telah menjadi faktor pendorong dan penggerak Kota Pekalongan menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang cukup berkembang pada abad ke-19. Sejak itu pula tumbuh dan berkembang sentra-sentra industri kerajinan dan perdagangan, seperti kerajinan batik, kerajinan perhiasan dan kerajinan lainnya, serta pasar-pasar, pertokoan, warung-warung, dan tempat-tempat perdagangan lainnya yang menjadikan kehidupan kota makin ramai dan makmur. Pada masa itu pula sesungguhnya telah tumbuh kaum saudagar dan pedagang kaya, kaum pengusaha (*entrepreneurship*) yang berhasil baik pribumi maupun orang Cina dan Arab, di samping kaum pengusaha Barat, para pejabat Belanda yang semuanya menjadi penghuni Kota Kolonial Pekalongan. Tidak mengherankan apabila penduduk kota menjadi prulal atau majemuk, demikian pula tata ruang perkampungan menjadi beragam, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya tempat pemukiman orang-orang Belanda, Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan tentu saja kampung pribumi yang mengisi ruang Kota Pekalongan. Berakhirnya Sistem Tanah Wajib pada 1870 dan diganti dengan sistem perkebunan memperluas pembukaan penanaman modal.<sup>22</sup>

---

22. Djoko Suryo, *Op.cit.* hlm. 121-122.

## Menjadi Kota *Gemeente* dan *Stadsgemeente*

Pada awal abad XX terjadi perubahan haluan politik Kolonial dari politik Kolonial Liberal menjadi Politik Kolonial Etis. Salah satu perubahan penting yang terjadi pada awal 1900-an adalah lahirnya undang-undang tentang Desentralisasi Pemerintahan (*Decentralisatier Wet*) atau Undang-Undang Otonomi Daerah pada masa kolonial di Indonesia. Undang-undang Desentralisasi yang ditetapkan pada 1903 telah dimungkinkan pelaksanaannya pada 1905 untuk membentuk administrasi pemerintahan kota (kolonial) yang semula dikepalai oleh asisten residen menjadi daerah *gemeenten* atau “kotapraja” (*municipalities*), dan kepemilikan tingkat otonomi yang terbatas dan dewan legislatif Kotapraja sendiri (*gemeenteraad*). Dewan Kota Praja tersebut dipilih atas perwakilan mayoritas orang Eropa, orang Indonesia, dan orang Asing Timur (Cina). Kota Praja berhak mengatur rumah tangga dan keuangan sendiri, serta mengatur pekerjaan untuk kepentingan umum, urusan kesehatan, dan urusan lain yang dipandang penting bagi warga kota. Kepala pemerintahan kota *gemeente* adalah *burgemeester*, yang dipilih oleh Dewan Kotapraja. Dengan adanya pembaharuan undang-undang 1922, unit pemerintahan *gemeenten* di Jawa dan Madura ditetapkan kembali menjadi *stadsgemeenten* (kotapraja penuh).

Sama dengan yang terjadi dengan sejumlah kota-kota lain di Jawa dan Indonesia, Kota Pekalongan pada tanggal 1 April 1906 juga ditetapkan sebagai daerah administrasi pemerintahan kotapraja atau *gemeente* dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* atau Stb. Tahun 1906/No.124, sesuai dengan Ordonansi yang ditandatangani oleh J.B. van Heutsz, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie, dan De Groot, wde (tweede) Algemeene Secretaris, di Bogor pada 21 Februari 1906.<sup>23</sup> Dengan demikian sejak pada saat itu Kotapraja Pekalongan beribukota (*hoofdplaats*) di Pekalongan dan secara resmi menjadi *de gemeente* Pekalongan. Daerah tersebut menjadi daerah

---

23. *Staatsblad van Nederlandsch – Indie over het Jaar 1906* (Batavia: Landsdrukkerij, 1907), No.124, hlm.1-3.

yang berkedudukan serta memiliki fungsi otonom dalam beberapa segi administrasi pemerintahan, termasuk kedudukan dan fungsi yang otonom dalam beberapa segi. Seperti halnya dengan daerah *gemeente* lainnya, Kotapraja Pekalongan juga memiliki Dewan Kotapraja, dengan anggotanya terdiri atas delapan orang Eropa, dua orang Indonesia dan tiga orang Timur Asing (Cina dan Arab).<sup>24</sup>Demikian pula Dewan Kotapraja dipimpin oleh seorang *burgeemester* yang dipilih oleh anggota dewan. Pada tahun 1926 pemerintahan Kotapraja Pekalongan memperoleh ketetapan mendasar dalam bidang administrasi pemerintahan, yaitu memiliki kekhasan sebagai daerah “pemerintahan otonom”.

Pekalongan kembali mengalami perkembangan baru dan dinamika baru, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, yang memiliki pengaruh dalam kebijakan penataan tata ruang dan kehidupan kota. Sejak saat itu, kedudukan Kota Pekalongan menjadi bertambah. Tak hanya menjadi ibu kota keresidenan dan kabupaten, namun juga sebagai ibu kota pemerintahan Kotapraja Pekalongan.<sup>25</sup>

## **Perkembangan Wilayah**

Pada masa Kolonial Belanda, Pekalongan dikenal sebagai wilayah Karesidenan. Pusat ibu Kota Keresidenan juga di Kota Pekalongan saat ini. Menurut Veth (1869), istilah Pekalongan secara harfiah berarti tempat kalong. Keresidenan ini memiliki batas-batas yang jelas. Di bagian utara Jawa berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah timur dengan Semarang dipisahkan dengan sungai Kutu, di selatan berbatasan dengan karesidenan Kedu, Bagelen dan Banyumas yang batasnya membentang di sepanjang lereng gunung Perahu, dan di barat dengan karesidenan Tegal yang dipisahkan oleh sungai Ulujami atau Seragi.

Lingkungan udara yang ada di sekitarnya pada umumnya sehat. Derajat panas di sini tidak mengalami banyak perbedaan karena

---

24. *Ibid.*, hlm.2.

25. Djoko Suryo, *Op.cit.* hlm. 124-125.

lahannya yang datar. Bagian selatan sedikit lebih sejuk. Termometer Fahrenheit biasanya pada pagi hari mencatat dari 74° sampai 76° dan pada siang hari dari 82° sampai 84°, sementara kesejukan gunung perahu pada petang hari sangat memengaruhi hawa panas itu. Cuaca biasanya sangat stabil, yang bisa membuat orang-orang Jawa dan Eropa di sini hidup sehat.

Tanah Pekalongan tidak begitu subur seperti daerah lain di Jawa, karena tanah datar ini kurang dialiri air dan juga menampung terlalu sedikit penduduk. Sungai-sungainya kurang penting dan hanya dalam jarak dekat saja bisa dilayari. Yang termasuk penting adalah sungai Seragi atau Ulujami. Sungai Pabean yang dikenal sebagai sungai Pekalongan hanya mengalir di kabupaten Pekalongan, dan sungai Kutu, sungai Orang, Roban dan Batang berada di kabupaten Batang. Melalui penunjukkan sejumlah besar cabang sungai di karesidenan ini, dibandingkan yang lain, ada banyak jembatan yang harus dirawat yang memberatkan penduduk. Jalan-jalan semuanya berada dalam kondisi baik.

Pekalongan dikenal dengan gunungnya yang tidak begitu tinggi. Gunung Prahu hanya sebagian saja terletak dalam batas-batasnya, yaitu pada perbatasan dengan Bagelen. Di sebelah barat gunung ini terdapat pegunungan Dieng, yang menjadi batas dengan Banyumas. Ke arah barat terdapat gunung perbatasan yang lebih rendah yang memilikipuncak bernama Grudo dan Rogo Jembangan. Di pegunungan Dieng terletak Pakaraman atau lembah kematian, satu-satunya lembah yang terus berkembang. Di sebelah barat Kali Lambir terdapat sejumlah sumber air panas yang memiliki kemiripan air dengan sumber air Pelantungan. Di sekitarnya, di sejumlah tempat ditemukan sumur-sumur minyak (750). Dari sumber air ini, ahli psikometri, Tuan P.J. Maier, melakukan pengukuran pada bulan September 1846.

Pantai di Pekalongan juga terbilang aman dan bisa didekati oleh kapal-kapal besar sampai jarak dekat. Hanya di sebelah utara Ujung Gunong terbentang sebuah celah karang sampai kira-kira dua mil di laut. Muara Sungai Batang dan Pabean ini menawarkan tempat berlabuh yang aman bagi perahu-perahu pribumi. Sebaliknya,



muara sungai Pekalongan dilengkapi dengan tepian yang terbentang, yang mempersulit pelayaran masuk dan keluar untuk rakit karena kedangkalan dan banjirnya. Jalan darat yang besar membentang melalui karesidenan ini dari barat ke timur sepanjang 40 paal dan dari utara ke selatan 37 paal. Di Pekalongan orang masih menjumpai banyak hutan lebat seperti hutan Sajati yang terletak 24 paal di selatan Batang, yang terbentang 6 paal jauhnya, hutan Banyu Putih, Pacelongan, Suba, Trogon dan Sogon di Subah; Ageng, Grudu, Lolong, Heger, Tandon, Padata di Sawangan; serta Bokor, Ujung Negro dan Winong di Bandar Guniwang. Beberapa hutan menghasilkan jenis kayu jati dan kayu perabotan atau kayu ukir lainnya. Pada tahun 1854 terdapat 124 hutan kayu.

Sampai dengan tahun 1869, Karesidenan ini mencakup dua kabupaten yakni Pekalongan dan Batang, yang masing-masing kembali dibagi dalam distrik. Setiap kabupaten diperintah oleh seorang bupati. Seorang jaksa kepala diangkat untuk memimpin kepolisian. Orang-orang Arab, Melayu dan Cina masing-masing memiliki pimpinannya sendiri. Selanjutnya ada lima orang Kontrolir pada penghasilan agrarian dan perkebunan, serta sembilan Kontrolir untuk tanaman nila. Penduduk pribumi dikenal lembut, baik hati, rajin dan sangat ramah. Pada zaman dahulu, komoditas perdagangan yang ramai dikelola yakni daging kering, kapas, nila baik basah maupun kering, dan tembakau. Ketahanan bahan pangan telah membuat penanaman kapas dan perdagangannya terhenti. Pembuatan kain hanya dilakukan sejumlah warga karena orang-orang Eropa mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang murah. Dahulu Pekalongan memasok nila bagi seluruh Jawa, tetapi tanaman ini sama sekali merosot dan perdagangan tembakau juga belakangan sangat mundur. Ekspor lewat darat menuju Tegal, Cirebon dan Priangan masih sangat besar. Jenis-jenis tembakau yang baik dikirim ke Priangan. Pasar-pasar Pekalongan sangat ramai dikunjungi. Tetapi sebagai akibat penghapusan pemborongan pasar, banyak orang berjualan di sepanjang jalan, karena para pedagang kini tidak lagi wajib untuk membawa barang-barang mereka ke pasar permanen. Kaum wanita sangat berpengalaman dalam memintal kain

dan menenun baju dari kain berwarna yang di kalangan pedagang dikenal dengan nama kain Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan terletak di karesidenan ini, yang mencakup bagian baratnya. Kabupaten ini terbagi dalam distrik Pekalongan, Wiroseda, Seragi, Bandar Guniwang, Sawangan dan Pekajangan, dengan kira-kira 140 ribu penduduk. Distrik Pekalongan di utara berbatasan dengan laut Jawa, di barat dengan Wiradesa, di selatan dengan Pekajangan dan Masin, dan di timur dengan Batang. Penduduk di daerah ini mencakup 31.736 jiwa.

Ibukota Pekalongan di Jawa terletak di Distrik Pekalongan, dalam jarak dekat dari laut yang pantainya berpasir dan mudah dimasuki di sungai Pekalongan, pada 6°53'45" Lintang Selatan dan 109° 39'7" Bujur Timur. Kota ini terletak 303 paal di sebelah timur Batavia, 100 paal sebelah barat laut Magelang, 64 paal di sebelah barat Semarang dan 42 paal di sebelah timur Tegal. Sungai Pekalongan membaginya menjadi dua. Di aliran baratnya terletak sebuah pesanggrahan, sebuah *societeit*, rumah-rumah orang Eropa, sebuah gereja baru dari jemaat Hervormde yang diberkati pada bulan Juli 1852, kampung Cina yang terdiri atas rumah-rumah batu, beberapa kampung pribumi yang rumah-rumah bambunya dikelilingi dengan pohon-pohon buah, paseban, rumah bupati, sebuah mesjid dan sebuah tangsi bagi prajuritnya. Rumah residen, kantor pos dan perkantoran terletak di sebuah lapangan persegi, yang ditumbuhi dengan pohon peneh, membentang menjadi tempat berjalan-jalan. Di atas sungai ini terletak sebuah jembatan yang bisa menghubungkan orang-orang ke aliran timur, tempat benteng *de Beschermer* berdiri. Benteng ini juga berfungsi sebagai penjara dan gudang nila.

Pekalongan juga memiliki sebuah sekolah pemerintah. Meski dalam kondisi tumbuh, namun sekolah tersebut termasuk yang terbaik di Jawa. Institusi pendidikan ini menampung 57 siswa pada tahun 1856. Adapun gedung sekolah tersebut diperbaiki pada tahun 1857. Pekalongan merupakan tempat tinggal residen, bupati, sekretaris karesidenan dan seorang jaksa kepala, ajun jaksa, penghulu kepala, seorang kapten Cina, seorang kepala orang Arab dan kepala orang

Melayu. Mereka membangun sebuah kompleks pelabuhan, sebuah gudang penjualan garam di bawah pengelolaan seorang kepala gudang, sebuah agen kantor balai harta Semarang, sebuah kantor pengukuran dan penafsiran tanah, sebuah kantor pos dengan Pos Komis, seorang notaris di samping seorang juru lelang dan seorang komis bendahara. Komis ini sekaligus menjadi kepala pelabuhan dan ditugasi menjaga keamanan pantai. Selain itu dibentuk pula komisi pendidikan dan sebuah sub-komisi kekayaan yang mengurus kepentingan koloni di Belanda. Dinas kesehatan dijalankan oleh seorang dokter sipil dan seorang perwira kesehatan. Jemaat Protestan dipimpin oleh seorang pendeta yang bertempat di sini. Peradilan orang-orang Eropa berada di bawah wewenang peradilan Semarang, sementara untuk orang pribumi di bawah wewenang pengadilan negeri. Sementara itu pelabuhan di Pekalongan dibuka bagi perdagangan umum pada tanggal 31 Mei 1859, baik untuk ekspor maupun impor. Tetapi kemudian pembukaan ini dicabut kembali. Kapal jelajah juga bersandar di pelabuhan ini.

Sungai Pekalongan bersumber dari gunung Telogondro (762) yang menjadi pembatas dengan sungai Serayu di selatan. Pada mulanya sungai ini dibagi menjadi dua cabang yaitu Telogondro dan Mangon yang bertemu dalam sungai Kupang. Kupang memiliki cabang Payingan dan sungai Pekalongan. Sungai tersebut bermuara ke laut. Panjangnya 24 paal dan bisa dilayari sampai jarak 12 paal, dan di kota itu terdapat lebar 90 kaki. Timbunan pasir yang terbentang luas dapat dijumpai di muara sungai, sehingga mempersulit pelayaran keluar dan masuk dari rakit, baik karena kedangkalan maupun karena ombaknya. Di atas timbunan pasir ini, lalu-lintas dengan pelabuhan laut berlangsung dan produk pedalaman, seperti yang telah kita lihat, setiap tahun sampai sebanyak 80 ribu pikul bisa ditimbun, seperti komoditas dagang lainnya yang dikapalkan di sepanjang jalur yang sulit ini. Ketika angin musim barat daya berhembus, lalu-lintas dengan pelabuhan laut terhenti selama beberapa minggu dan bahkan bulan, sehingga sangat perlu bila sebuah dermaga pelabuhan dibangun di Pekalongan (Veth, 1869).

## Pertumbuhan Penduduk

Untuk memahami perkembangan suatu wilayah, penduduk merupakan aspek yang penting untuk dikupas. Data-data kependudukan Keresidenan Pekalongan sudah ada sejak akhir abad ke-18. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sejak akhir abad XVII hingga tahun 1830, atau zaman sebelum Tanam Paksa, perkembangannya tidak terlampau cepat. Pada tahun 1795 jumlah penduduk Pekalongan hanya 136.348 jiwa, tiga puluh lima tahun kemudian, yaitu tahun 1830 jumlah penduduk Pekalongan menjadi 233.300 jiwa yang berarti mengalami kenaikan dua kali lipat. Jika dibandingkan dengan penduduk Jawa, maka jumlah penduduk Pekalongan pada tahun 1705 sebesar 5,2% nya. Pada awal Tanam Paksa (1830), prosentasenya menurun, hanya 4,9 %.

Tabel 2.1  
Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1795-1812<sup>26</sup>

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah Utara	Jawa
1795	136.348	1.343.384	2.583.522
1802	162.343	1.601.724	2.852.257
1808	171.096	1.679.734	2.941.956
1812	107.576	1.458.833	2.762.793
1815	113.396	1.344.554	2.707.104
1820	190.298	1.840.845	3.474.956
1823	192.302	1.867.840	3.623.893
1824	200.000	1.895.635	3.780.031
1825	207.000	1.922.201	3.929.979
1826	214.326	1.969.764	4.031.578

26. Peter Boomgaard dan A.J. Goozen (ed), 1991, *Changing Economy in Indonesia (CEI)*, vol. 11; *Population Trends 1795-1942*, Amsterdam: Royal Tropical Institute (KIT).

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah Utara	Jawa
1827	213.500	1.993.257	4.283.150
1828	217.079	2.058.051	4.501.735
1829	232.800	2.138.565	4.640.858
1830	233.300	2.182.186	4.768.699

Sumber: *Changing Economy Indonesia (CEI)*, vol 11

Pada masa Tanam Paksa, penambahan penduduk Pekalongan meningkat pesat. Awal Tanam Paksa, jumlah penduduk sebesar 233.300 jiwa, dan pada akhir Tanam Paksa sebesar 461.879 jiwa. Hal ini berarti selama 40 tahun mengalami perkembangan lebih dari 100%. Meskipun demikian, penambahan penduduk ini masih lebih rendah dibandingkan dengan keseluruhan Jawa bagian utara. Wilayah ini pada awal periode Tanam Paksa memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.182.186, dan pada akhir Tanam Paksa meningkat pesat menjadi 5.396.476 yang berarti mengalami kenaikan jauh lebih tinggi. Hal yang sama jika dibandingkan dengan penambahan penduduk seluruh Jawa, wilayah Pekalongan masih tergolong relatif rendah. Pada tahun 1830 penduduk Jawa sebesar 4.768. 699 jiwa, dan pada akhir periode Tanam Paksa sebesar 11.250.022 jiwa.

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1830-1870**

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah utara	Jawa
1830	233.300	2.182.186	4.768.699
1831	231.300	2.233.103	4.877.790
1832	232.361	2.306.946	Ttd
1833	224.000	2.329.217	Ttd
1834	216.092	2.326.853	Ttd
1835	221.319	2.368.468	Ttd

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah utara	Jawa
1836	221.100	2.417.132	Ttd
1859	282.427	3.950.066	Ttd
1860	319.678	4.103.438	8.883.814
1861	323.905	4.214.843	Ttd
1862	326.704	4.318.147	Ttd
1863	329.312	4.403.965	Ttd
1864	332.505	4.425.924	Ttd
1865	351.086	4.536.384	Ttd
1866	364.469	4.681.527	Ttd
1867	381.237	4.851.090	Ttd
1868	444.803	5.076.859	Ttd
1869	457.130	5.226.657	Ttd
1870	461.879	5.396.476	11.250.022

Sumber: CEI, vol. 11.

Keterangan: ttd= tidak tersedia data

Penduduk Jawa terdiri dari beragam suku atau bangsa. Paling tidak ada tiga kelompok, yaitu Jawa, Eropa, Cina, serta Arab dan Timur Asing lain. Di antara empat kelompok ras bangsa itu tentu yang paling banyak adalah penduduk Jawa. Di antara penduduk bukan pribumi, orang-orang Cina jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan orang Eropa dan orang Arab. Mereka bekerja sebagai pedagang, juragan ikan, dan kegiatan bisnis lainnya. Orang Arab jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan dengan orang Eropa. Umumnya mereka mengumpul di kampung Arab. Orang-orang Eropa jumlahnya tidak banyak. Sebagian bekerja dalam birokrasi pemerintahan tingkat atas di Keresidenan Pekalongan, residen dan keluarganya dipastikan berasal

dari orang Belanda. Sebagian lagi bekerja di lingkungan perkebunan, administratur pabrik gula umumnya Eropa, terutama Belanda.

**Tabel 2.3**

**Komposisi Penduduk Pekalongan Berdasarkan Asal Suku Bangsa**

Tahun	Jawa	Eropa	Cina	Arab dan timur asing lain	Jumlah
1856	250.757	435	3.426	646	255.264 jiwa
1857	257.589	420	3.452	668	262.129 jiwa
1858	268.833	432	3.570	697	273.082 jiwa
1859	284.427	405	3.695	681	287.208 jiwa
1860	319.678	423	3.765	736	324.602 jiwa

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, 1869, P.N. van Kampen

Veth (1869) menulis bahwa di antara angka-angka penduduk pribumi Jawa antara 1856 dan 1858 masih ditemukan sejumlah budak. Tahun 1856, jumlahnya mencapai angka-angka berikut ini: 107, 96 dan 100 orang.<sup>27</sup> Ini tentu suatu ironi karena gerakan pemberantasan perbudakan sudah digerakkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, tetapi jumlah budak orang Jawa masih cukup besar.

Pada tahun 1860 jumlah seluruh penduduk berjumlah 69.338 jiwa. Hal ini berarti 27 ½% lebih banyak daripada jumlah tahun 1856, yang dalam waktu empat tahun menunjukkan kenaikan tahunan 6 ¼%, sebuah kenaikan yang sangat pesat. Kenaikan pesat penduduk pribumi pada tahun 1860 diduga berasal dari perhitungan yang lebih cermat. Kenaikan penduduk Eropa mengalami fluktuasi dan pada tahun 1860 hanya 12 jiwa lebih sedikit daripada tahun 1856. Penduduk Cina menunjukkan kemajuan pesat sehingga angka kelompok ini pada tahun 1860 dibandingkan tahun 1856 mengalami

27. P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie*, (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869).

kenaikan 339 jiwa atau hampir 9% yang berarti kenaikan tahunan 2 ½%. Kelompok orang Arab dan timur asing lainnya juga mengalami fluktuasi meskipun dibandingkan pada tahun 1856 dan 1860 terjadi kenaikan 90 jiwa.

Kenaikan pesat terjadi di antara penduduk pribumi yang dibandingkan dengan jumlah pada tahun 1856, pada tahun 1860 sebanyak 68.921 jiwa atau 27% lebih banyak. Karena kenaikan terbesar pada tahun 1860 terjadi dan mencapai angka 37.251 jiwa dan ini diduga berasal dari perhitungan yang lebih cermat, sehingga dari situ kita tidak bisa membuat perhitungan tentang kenaikan tahunan rata-rata. Dibandingkan dengan angka setiap tahun sebelumnya, kenaikan jumlah penduduk pribumi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Kenaikan Penduduk Pekalongan 1857-1860**

Tahun	Kenaikan jumlah penduduk
1857	6.832
1858	10.744
1859	14.094
1860	37.251

Sumber: Veth, 1869, *Ibid.*

Data-data dalam Tabel 1.4. menunjukkan bagaimana setiap tahun angka kenaikan ini meningkat dan pada tahun-tahun terakhir cukup besar jumlahnya. Kenaikan jumlah penduduk ini terkait dengan perubahan wajib tanam nila yang telah berubah. Selama masa sebelumnya wajib tanam terhadap tanaman ini sangat membebani penduduk Pekalongan. Pada tahun 1859, tanaman ini dihapus sehingga beban penduduk menjadi berkurang. Akibatnya banyak penduduk yang kembali ke tempat tinggal lamanya.



**Tabel 2.5**  
**Petani Pemilik Sawah di Pekalongan 1856-1860**

Tahun	Petani pemilik sawah	Jumlah keluarga petani pemilik sawah	Petani bukan pemilik sawah
1856	34.112	170.560	80.197
1857	35.213	176.065	81.524
1858	35.867	184.335	83.998
1859	38.891	194.455	89.972
1860	39.574	197.870	121.808

Sumber: Veth, 1869, *Ibid.*

Sebagian besar penduduk pribumi di Pekalongan hidup dari pertanian. Lahan sawah merupakan modal usaha yang penting. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki modal sawah. Di antara penduduk pribumi, jumlah keluarga petani yang memiliki sawah terlihat dalam Tabel 1.5.

Seperti halnya jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah petani dan keluarga petani pemilik sawah juga terjadi di akhir tahun 1860-an. Hal ini jelas ditentukan oleh faktor dihapuskannya wajib tanam nila yang menjadi beban dan mengakibatkan migrasi penduduk di Keresidenan Pekalongan. Peningkatan penduduk juga terjadi pada penduduk bukan pemilik sawah. Kenaikan seperti ini kelihatannya juga berlaku di sejumlah karesidenan lain yang diterapkan sistem Tanam Paksa. Ini tidak begitu menguntungkan bagi Pekalongan, meskipun tidak bisa dibantah bahwa karena wilayah ini merupakan sebuah karesidenan pantai dan mencakup sepanjang pantai utara, sebagian besar penduduk mungkin sibuk dengan perkapalan, perdagangan dan penangkapan ikan.<sup>28</sup>

---

28. Veth, *ibid.*, ttd.

**Tabel 2.6**  
**Penduduk Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa 1871-1900<sup>29</sup>**

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah Utara	Jawa
1871	471.390	5.592.346	Ttd
1872	479.393	5.725.361	Ttd
1873	485.425	5.837.070	Ttd
1874	494.796	5.937.732	Ttd
1875	496.258	5.941.880	Ttd
1876	499.476	5.979.623	Ttd
1877	503545	6.057.877	Ttd
1878	506.554	6.123.881	Ttd
1879	508.110	6.210.660	Ttd
1880	508.720	6.254.258	20.021.897
1881	514.138	Ttd	20.185.090
1882	516.690	Ttd	20.263.145
1883	516.694	Ttd	20.436.132
1884	520.170	Ttd	20.725.088
1885	525.027	Ttd	21.204.705
1886	532.145	Ttd	21.716.177
1887	539.372	Ttd	22.139.624
1888	548.055	Ttd	22.526.885
1889	544.156	Ttd	22.806.463
1890	550.069	Ttd	23.729.679
1891	552.217	Ttd	23.825.863

29. Peter Boomgaard dan A.J. Goozen (ed), 1991, *Op.cit.*

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah Utara	Jawa
1892	553.247	Ttd	23.973.192
1893	556.444	Ttd	24.279.749
1894	559.524	Ttd	24.746.368
1895	560.355	Ttd	25.454.691
1900	598.218	Ttd	28.385.821

Sumber: CEI, vol. 11.

Keterangan: *ttd*= tidak tersedia data

Pada tahun 1870, Sistem Tanam Paksa di Jawa secara formal berakhir. Berakhirnya sistem seperti itu tentu berpengaruh terhadap perubahan demografi, termasuk di Keresidenan Pekalongan. Tabel 1.6 menggambarkan perkembangan demografi Keresidenan Pekalongan pasca Sistem Tanam Paksa, yaitu masa Politik Kolonial Liberal.

Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa pada awal Politik Kolonial Liberal, jumlah penduduk Karesidenan Pekalongan sebesar 471.390. Pada akhir Politik Kolonial Liberal, penduduk telah berubah menjadi 598.218 jiwa. Hal ini berarti selama 30 tahun terjadi penambahan penduduk sebesar 126.828 jiwa atau hampir 27%, yang berarti rata-rata pertambahan penduduk pertahun 0,9 %. Pertambahan penduduk pada masa ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan dengan pada masa Tanam Paksa.

Sejak awal abad XX terjadi perubahan haluan politik Kolonial Liberal ke Politik Kolonial Etis. Perubahan Politik ini mengakibatkan perhatian pemerintah terhadap pertanian penduduk pribumi lebih baik. Pertanyaannya apakah perubahan ini juga berdampak bagi perubahan kependudukan?

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan Politik Etis telah terjadi perubahan kependudukan selama periode itu. Jumlah penduduk Pekalongan pada tahun 1905 sebesar 1.969.450 jiwa, dan tahun 1942 sebesar 2.838.381 jiwa. Hal ini berarti selama 27 tahun penduduk Karesidenan Pekalongan mengalami penambahan sebesar

868.931 jiwa, atau mengalami kenaikan 44,1 % selama masa 27 tahun. Jika dihitung rata, maka rata-rata kenaikan penduduk tiap tahunnya sebesar 1,63 %. Kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan masa Tanam Paksa, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan masa Politik Kolonial Liberal.

**Tabel 2.7**  
**Penduduk Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah dan Jawa**  
**1900-1942**

Tahun	Pekalongan	Jawa Tengah	Jawa
1905	1.969.450	Ttd	29.971.088
1912	2.099.533	Ttd	31.505.305
1913	2.139.981	Ttd	31.850.231
1914	2.159.911	Ttd	32.437.778
1915	2.189.953	Ttd	32.872.857
1916	2.214.075	Ttd	33.244.251
1917	2.241.779	Ttd	33.577.606
1918	2.216.953	Ttd	33.376.545
1919	2.229.683	Ttd	33.127.961
1920	2.243.002	Ttd	34.433.476
1921	2.261.221	Ttd	34.464.334
1922	2.299.231	Ttd	34.801.215
1923	2.306.469	Ttd	35.037.523
1924	2.345.974	Ttd	35.459.602
1925	2.368.325	Ttd	35.745.089
1926	2.377.322	Ttd	36.236.177
1927	2.392.977	Ttd	36.536.139

1928	2.433.140	Ttd	37.027.564
1930	2.603.766	10.965.580	40.891.093
1940	2.931.999	12.449.807	47.491.858
1942	2.838.381	12.147.177	45.445.364

Sumber: *CEI vol 11.*